

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ammulch & Dalina, *Perlindungan Hakan Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Del Pan Him Purity Dan Hakamla LEGITIMASI, Vol. 3 No. 1. J-Juni 2019.
- Arif Gosita dalam Buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Badriyah Khaled. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Pustaka Yustisia. 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers: Jakarta, 2016.
- Core Group, *Modul Konseling bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Mitra Perempuan Workshop, Jakarta, 27 Juni 2008.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom dalam Buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Gosita Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Herman Sujarwo, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Vol. VI No. 02, November 2020.
- La Jamaa, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hubww Pidana Indonesia*. Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014. ISSN: 2356-1440,
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Panggabean, M. L. *Kebijakan Legislatif dalam Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 20121.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 1986.
- Soesilo, R, *KUHP dan Komentar*, Politeia, Bogor .1981.
- Syamsyul Fatoni. *Urgensitas Perlindungan Saksi dan Korban Dalam mengungkap kasus KDRT*. MIMBAR HUKUM. Vol. 26 No. 3 Oktober 2014.
- Tedie Subarsyah Sumadikara, *Eksistensi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Litigasi, Vol. 17 No. 2, 2016. dengan pISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274
- Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Utrecht. *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta, 2019.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet:

<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 4 September 2022 pukul 19.16

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/6440/3888> diakses pada tanggal 20 November 2022 pukul 00.57

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/6440/3888> diakses pada tanggal 20 November 2022 pukul 00.57

<https://media.neliti.com/media/publications/62106-ID-perlindunganhukum-terhadap-suami-sebaga.pdf> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Defenisi Suami diakses dari

<http://kbbi.web.id> Suami diakses pada tanggal 22 September 2022 pukul 21.41

WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : Shinta Meilani Hasibuan, S.H.
 Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 13 Mei 1981
 Alamat Rumah : Harapan Indah, Cluster Asia Tropis
 Blok AT 10 No.2 Bekasi
 Alamat Kantor : Cik9 Building Jl. Cikini Raya No. 9
 Menteng - Jakarta Pusat
 Status Perkawinan : Menikah
 Istri : Gunawan Martua Situmorang, S.T., M.M.
 Anak : 1. Daniel Nikon Martua Situmorang
 2. Joshua Jeremiah E.H. Martua Situmorang

II. Pendidikan

- Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia, Salemba, Jakarta - Tamat Tahun 2003
- Sekolah Menengah Atas di SMA Katolik RICCI 2 Pondok Aren, Tangerang - Tamat Tahun 1999
- Sekolah Menengah Pertama di SMP Katolik RICCI 2 Pondok Aren, Tangerang - Tamat Tahun 1996
- Sekolah Dasar di SDN 01 Pondok Labu, Jakarta Selatan - Tamat Tahun 1993

III. Pengalaman Organisasi

- Bendahara BPH Komisi Dewasa GKI Kwitang, Jakarta Pusat (2011 – 2014)
- Bendahara BPH Komisi Dewasa GKI Kwitang, Jakarta Pusat (2014 – 2017)
- Pengurus Komisi Wanita Bidang Pembinaan GKI Harapan Indah Bekasi (2022 – 2024)

- Bendahara Pusat Bantuan Hukum Dipo86
Jakarta Pusat (2022 – 2023)
- Ketua Angkatan Alumni Fakultas Hukum Angkatan 1999 UKI
Jakarta Pusat (2022 – Sekarang)
- Anggota DPC PERADI Jakarta Barat
Jakarta Barat (2023 – Sekarang)

IV. Pekerjaan

- Henry Hasibuan, S. H., M. H. & Rekan, Jakarta Pusat (2003 – 2006)
- Pusat Bantuan Hukum Dipo 86, Cikini, Jakarta Pusat (2022)
- PT. DJS Niaga Indonesia, Jakarta (2022 – Sekarang)
- Dr. Aarce Tehupeiory, S. H., M. H. Consultan, Cikini Jakarta Pusat
(2023 - Sekarang)

V. Karya Ilmiah

- Skripsi dengan Judul: Prosedur Penuntutan Ganti Rugi Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Praktek
- Jurnal dengan Judul: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual